



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAFITRI HANDAYANI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **222981**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 460.840.000

1. Tanah Seluas 280 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.840.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/108 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 110 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 58.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX PICK UP 1.5 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.722.800**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 40.383.805**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 634.946.605**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 634.946.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.